

RENJA

(RENCANA KERJA)

2022



Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

KATA PENGANTAR

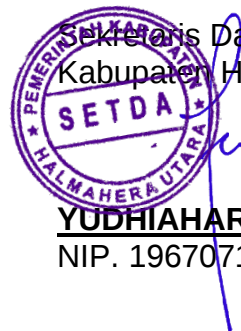
Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 telah selesai disusun.

Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan lebih terarah, terukur dan akurat.

Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Tobelo, 21 Juli 2021

Sekretaris Daerah
Kabupaten Halmahera Utara,



YUDHIAHART NOYA, S.si, MH

NIP. 196707101991031017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD	24
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	42
BAB V. Penutup	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Rencana Kerja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun-tahun sebelumnya. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 25

Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menyusun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 adalah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengevaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran serta sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud Dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2016-2021

Sekretariat Daerah sejak awal terbentuknya terdiri dari 9 (sembilan) batang tubuh Perda APBD sesuai dengan jumlah bagian, pertengahan tahun 2018 dilebur lagi menjadi 8 (delapan) batang tubuh Perda APBD dan tahun 2020 sudah menjadi 1 (satu) batang tubuh Perda APBD. Capaian Kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta dari seluruh bagian.

Perbandingan antara anggaran belanja langsung pada Renja 2020 dengan APBD 2020 dan APBDP 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

2020	Program	Kegiatan	Anggaran
Renja	16	100	Rp. 44.030.256.191,00
APBD	16	100	Rp. 30.989.452.975,00
APBDP	16	89	Rp. 25.774.860.350,00

Target kinerja dari program dan kegiatan yang dicapai pada tahun anggaran 2020 sesuai hasil rekapitulasi 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan dari 16 (enam belas) program tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO		URAIAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.00	92.00
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	95	95
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95	95
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	95	50
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	95	95
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	85	95
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	95	95
	7	Penyediaan alat tulis kantor	95	95
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	950	95
	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95	95
	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95	95
	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	85	95
	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95	-
	13	Penyediaan Makanan Dan Minuman	95	95
	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95	95
	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	95	95
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	85.71
	1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	95	95
	2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	95	95
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95	95
	4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	95	95
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95	95
	6	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	95	-
	7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	95	0
	8	Sewa gedung kantor/rumah	95	95.
3		Program peningkatan disiplin aparatur	95	0
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	95	0

	2	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten	95	-
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95	20.00
	1	Pembinaan Perangkat Kecamatan	100	100
	2	Studi Referensi Pengelolaan Dokumentasi Hukum	95	-
	3	Studi Referensi Tugas Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	95	-
	4	Studi Referensi Pengelolaan Keuangan KDH/ WKDH, Perjalanan Dinas, Pajak, dan Penyusunan Program	95	-
	5	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal	95	0
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95	64.29
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	95	95
	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	95	0
	3	Penyusunan LPPD dan EKPOD	100	100
	4	Kunjungan Kerja dan Inspeksi Asisten Setda	95	95
	5	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	95	95
	6	Fasilitasi Evaluasi ANJAB dan ABK	95	95
	7	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	95	95
	8	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	1 Keg	1 Keg
	9	Penyampaian Laporan Penerapan SPM Kepada Mendagri	95	95
	10	Fasilitas Pelaksanaan Monitoring SAKIP	95	0
	11	Pelaksanaan Fasilitas E-Sakip Review	1 Keg	1 Keg
	12	Fasilitas Pelaksanaan Coching Clinic Penyusunan LKJ	95.00	95.00
	13	Fasilitas Penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik	95.00	95.00
	14	Fasilitas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	95.00	0.00
6		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	97.00	72.50
	1	Rapat Koordinasi Bupati Dengan Para Camat dan Kepala Desa	70.00	70.00
	2	Rapat Koordinasi FORKOMPIMCAM	73.00	73.00
	3	Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	80.00	0.00
	4	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	98.00	98.00
	5	Rapat Koordinasi Unsur FORKOMPINDA	98.00	98.00
	6	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	98.00	98.00
	7	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	95.00	95.00

	8	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	95.00	95.00
	9	Peningkatan hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain	100.00	0
	10	Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	98.00	98.00
7		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	100	100
	1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	100	100
8		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	90	29.73
	1	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	100	-
	2	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	85.00	0
	3	Fasilitasi Pembakuan Nama Unsur Rupa Bumi	100	80
	4	Sosialisasi Daerah Otonomi Baru (DOB)	80.00	-
	5	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	17 Kec	7 Kec
	6	Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa bumi	75	75
	7	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Rupabumi Berbasis Geospasial	70	-
	8	Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupa bumi	70	-
	9	Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	90	70
	10	Penegasan Batas Wilayah dalam Kabupaten (Kecamatan)	85	-
	11	Sosialisasi dan Publikasi Peta Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota	95	95
9		Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	83	30.38
	1	Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat	75	0
	2	Manasik Haji	75	-
	3	Embarkasi Haji	80	0
	4	Ibadah Haji	80	80
	5	Pembinaan TPQ	70	0
	6	Pembinaan Keagamaan	80	75
	7	Diklat Pesparawi	75	0
	8	Fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	95	0
	9	Fasilitasi Pesparani Tingkat Nasional	95	0
	10	Pelaksanaan Nujulul Quraan	95	0
	11	Penyerahan pihak ke tiga pemberian bingkisan anak yatim piatu pada hari raya idulfitri dan natal	95	95
	12	Penyediaan Kelengkapan Ibadah	50	50
	13	Pendataan Sarana Pendidikan Keagamaan	95	95

10		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	75	75
	1	Monitoring dan Pengendalian Operasional Penyaluran BBMT	75	75
11		Program Pembinaan Hukum	95	54.29
	1	Fasilitas sosialisasi peraturan perundang undangan	95	95
	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan	95	0
	3	Pembuatan lembaran daerah dan berita daerah	95	0
	4	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan	95	95
	5	Legislasi rancangan peraturan perundang undangan	95	95
	6	Penyuluhan Hukum	95	95
	7	Fasilitasi pelaksanaan hak asasi manusia	95	0
12		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95	31.67
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan OPD	95	95
	2	HUT KORPRI	95	0
	3	Seleksi BAPOR KORPRI Kabupaten, Propinsi & Nasional	95	0
13		Program Penataan dan Pengembangan Perangkat Daerah	95	95.00
	1	Penataan Kelembagaan Daerah	95	95
	2	Fasilitasi Penyusunan Perda Dan Perbup Kelembagaan	95	95
	3	Evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dan SOTK	95	95
14		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	95	31.67
	1	Pembinaan kompetisi peningkatan kualitas kinerja pelayanan Publik	95	0
	2	Fasilitasi survey dan penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat	95	95
	3	Monev Ketatalaksanaan	95	0
15		Program Penataan Pemerintahan Kecamatan	98	49.00
	1	Kajian Pembentukan Kecamatan	97	-
	2	Rapat Evaluasi Pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat	98	98
16		Program pengembangan data/informasi	95	48.00
	1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	95	95
	2	Penyusunan RKT Sekretariat Daerah	1 Dok	1 Dok

Ket. Capaian Kinerja - (garis datar) Tidak teranggarkan setelah perubahan
Capaian Kinerja 0 (nol) tidak terealisasi

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA OPD dan pencapaian RENSTRA OPD s/d tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2020		CATATAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT REALISASI (%)	
1		3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat dan kearsipan	95,00%	190%	95%	95%	100%	95%	380%	400,00%	
02		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumahtanggaan	95,00%	190%	95%	95%	100%	95%	380%	400,00%	
03		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	95,00%	190%	95%	95%	100%	95%	380%	400,00%	
04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Sarana Prasarana	95,00%	190%	95%	95%	100%	95%	380%	400,00%	
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	B	CC	CC	B	100%	B	B	B	
06	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rasio Jumlah berita positif di media masa	95,00%	190%	95%	95%	100%	-	285%	300,00%	
07		Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	95,00%	190%	95%	95%	100%	95%	380%	300,00%	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2020		CATATAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT REALISASI (%)	
1		3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
08	Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Peserta Calon Jama'ah Haji	20	102	20	20	100%	20	142	222,00%	
09	Program Pembinaan Hukum	Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditetapkan	15	54	15	15	100%	15	84	169,00%	
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja OPD Baik	95,00%	190%	90%	90%	100%	95%	375%	395,00%	
11	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penanganan Administrasi Tapal Batas Sengketa yang Selesai	-	190%	100%	100%	100%	-	290%	0,00%	
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa melalui e-procurement	100%	190%	100%	100%	100%	100%	380.47%	380,47%	
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penghargaan bagi PNS berprestasi	95,00%	175%	85%	85%	100%	-	260%	274,00%	
15%	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase hasil pembangunan fisik dan non fisik	95,00%	195%	95%	95%	100%	95%	385%	405,26%	
15		Persentase paket yang di lelang	95,00%	195%	95%	95%	100%	95%	385%	405,26%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sinerjitas kinerja pelayanan OPD adalah diperlukannya perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Lingkup OPD, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Pusat.

Dengan melaksanakan musrenbang diharapkan strategi tersebut dapat mewujudkan perencanaan pembangunan terpadu, namun pada kenyataannya pelaksanaan musrenbang belum optimal dan belum dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan.

Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, berdasarkan indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, dapat disajikan melalui Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat dan kearsipan	95%	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumahtanggaan	95%	95%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	95%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	95%	95%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	95%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Sarana Prasarana	95%	95%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	95%	
5	Capaian nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	CC	CC	B	B	B	B	B	B	B	
6	Rasio Jumlah berita positif di media masa	95%	95%	95%	95%	95%	80%	-	-	-	Pindah Ke Kominfo
7	Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	95%	95%	95%	95%	95%	90%	90%	95%	95%	
8	Jumlah Peserta Calon Jemaah Haji	20	20	20	20	20	20	-	20	20	Pandemi Covid-19
9	Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditetapkan	15	15	15	15	15	84	44	1500%	1500%	
10	Persentase Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja OPD Baik	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
11	Persentase Penanganan Administrasi Tapal Batas Sengketa yang Selesai	100%	100%	-	-	-	90%	90%	-	-	
12	Persentase pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa melalui e-procurement	95%	95%	95%	95%	95%	100%	90,47%	95%	95%	

[illegible]

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini terkait dengan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan masih dirasakan kurang optimal, disebabkan karena buruknya disiplin kerja, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih rendahnya penguasaan tugas pokok dan fungsi dan lain sebagainya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan perangkat daerah yang penting peranannya, tetapi dalam memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal masih dirasakan kurang memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Ini merupakan suatu hambatan yang berakibat tidak tercapainya target dan sasaran, yang dapat dikategorikan sebagai “Isu”. Dengan demikian, ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya ketersediaan data/ informasi dan sistem informasi yang lebih akurat;
2. Belum Optimalnya SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Belum diterapkan *reward and punishment* dengan standar kriteria kinerja yang pasti;
5. Belum diterapkan standar operasional prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
6. Rendahnya kesadaran aparatur terhadap pemanfaatan hasil perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
7. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang telah disediakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tobelo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat dan kearsipan	95,00 %	13.231.353.025	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat dan kearsipan	95,00 %	13.231.353.025	
2		Tobelo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumahtanggaan	95,00 %			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumahtanggaan	95,00 %		
3		Tobelo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	95,00 %			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	95,00 %		
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tobelo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Sarana Prasarana	95,00 %	4.381.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Sarana Prasarana	95,00 %	4.381.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tobelo	Capaian nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	B	1.253.685.350	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	B	1.253.685.350	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tobelo	Persentase Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja OPD Baik	95,00 %		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja OPD Baik	95,00 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	n					n				
7	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tobelo	Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokol an	95,00 %	4.863.211.000	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokol an	95,00 %	4.863.211.000,00	
8	Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Tobelo	Jumlah Peserta Calon Jama'ah Haji	20	2.275.465.000	Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Koordinasi Kemitraan dengan Lembaga Keagamaan	90,00 %	2.275.465.000	
9	Program Pembinaan Hukum	Tobelo	Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditetapkan	15	997.889.350	Program Pembinaan Hukum	Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditetapkan	15	997.889.350	
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tobelo	Persentase Penanganan Administrasi Tapal Batas Sengketa yang Selesai	-	735.760.650	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penanganan Administrasi Tapal Batas Sengketa yang Selesai	-	735.760.650	
11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tobelo	Persentase pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa melalui e-procurement	100%	725.005.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa melalui e-procurement	100%	725.005.000	
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tobelo	Persentase penghargaan bagi PNS berprestasi	95,00 %	1.110.340.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penghargaan bagi PNS berprestasi	95,00 %	1.110.340.000	
13	Program Pengembangan Data/Infor	Tobelo	Persentase hasil pembangunan fisik	95,00 %	130.210.000	Program Pengembangan Data/Infor	Persentase hasil pembangunan fisik	95,00 %	130.210.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	masi		dan non fisik			masi	dan non fisik			
14			Persentase paket yang di lelang	95,00 %			Persentase paket yang di lelang	95,00 %		
JUMLAH TOTAL					29.703.919.375				29.703.919.375	

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan (RPJM Nasional). RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014 yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, RPJMN sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah;
- c. Pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan

akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Sasaran Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2022 beserta prakiraan maju (prognosis) nya pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2022	2023
Meningkatnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan dan kerumahtanggaan serta sarana prasarana	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan dan kerumahtanggaan serta sarana prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat dan kearsipan	95%	95%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumahtanggaan	95%	95%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	95%	95%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana prasarana	95%	95%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Capaian nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	B	B
	Terwujudnya kualitas keprotokolan	Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	95%	95%
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai spiritual	Terciptanya manusia yang beriman dan bertaqwa	Jumlah Peserta Calon Jama'ah Haji	20	20
Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditetapkan	15	15
Mewujudkan budaya kinerja dan akuntabilitas kinerja OPD lebih baik	Sumber Daya Manusia Bagian Tata Pemerintahan Dan Kecamatan	Persentase Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja OPD Baik	95%	95%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2022	2023
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah 6 desa Kecamatan Kao Teluk khususnya dan masyarakat Halut pada umumnya	Mensejahterakan masyarakat wilayah 6 desa Kecamatan Kao Teluk khususnya dan masyarakat Halut pada umumnya	Persentase Penanganan Administrasi Tapal Batas Sengketa yang Selesai	-	-
Terwujudnya sistem pengadaan barang/ jasa yang kredibel	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persentase pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa melalui e-procurement	95%	95%
Meningkatkan kualitas disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	Terwujudnya aparatur yang sejahtera sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab	Jumlah penghargaan bagi PNS berprestasi	95%	95%
Meningkatkan kualitas dan memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur serta terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Terciptanya sinergitas dan koordinasi yang dinamis antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase hasil pembangunan fisik dan non fisik	95%	95%
		Persentase paket yang di lelang	95%	95%

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang direncanakan sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan ke Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Menindaklanjuti surat dari Bappeda terkait dengan usulan Musrenbang Kecamatan ke Sekretariat Daerah, keputusan bersama dengan semua kepala bagian tidak dapat mengakomodir usulan tersebut karena kecilnya anggaran setiap tahunnya apabila ada penyesuaian maupun efisiensi anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan terbaru untuk Periode Tahun 2022 beserta prakiraan maju (prognosis)nya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		Penang. jawab Keg
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sekretariat Daerah					40.908.866.470,00				44.999.753.117,00		
I	Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah Terlaksannya penataan Administrasi Umum				100%	34.052.365.920	APBD		100%	37.457.602.512,00	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi konsistensi Renja Terhadap Renstra		100%	100%		100%	396.550.000,00	
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan nilai dokumen LPPD,Tersedianya standar pelayanan minimal (SPM), Terlaksananya laporan penerapan SPM	Tobelo	95%	360.500.000,00		95%	396.550.000,00	Bag. Tapem
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Peningkatan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah		100%	100%		100%	6.600.000,00	Bag. Umum
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Tobelo	100%	6.000.000,00		100%	6.600.000,00	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tobelo	95%	95%		95%	1.363.933.175,00	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PDH, KDH dan WKDH		60 Stel	180.000.000,00		60 Stel	198.000.000,00	
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tobelo	Kegiatan	109.725.000,00		Kegiatan	120.697.500,00	Bag. Korpri
		3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek	Tobelo	Orang	535.856.250,00		12 Orang	589.441.875,00	Bag. Umum, Hukum, Kesra, ULP
		4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tobelo	orang	395.608.000,00		150 orang	435.168.800,00	Bag. Hukum, Tapem
		5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tobelo	Keg	18.750.000,00		8 orang	20.625.000,00	Bag. ULP
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%		100%	8.921.118.690,00	Bag. Umum
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik	Tobelo	bln	250.000.000,00		1 paket	275.000.000,00	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya suku cadang, bsm genset kantor bupati dan peralatan kantor	Tobelo	bln	1.753.360.000,00		1 paket	1.928.696.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		Penang. jawab Keg
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan		Paket	450.000.000,00				495.000.000,00	
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya kunjungan kerja pejabat, Tersedianya makan minum tamu kesekretariatan	Tobelo	1 laporan	1.000.000.000,00			1 laporan	1.100.000.000,00	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah antar propinsi, Terlaksananya kunjungan/ inpeksi, Terlaksananya kunjungan kerja KDH & WKD dalam Kabupaten Halmahera Utara, Terlaksananya kunjungan kerja KDH & WKD ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Halut/ Luar Daerah Antar Provinsi	1 laporan	4.656.747.900,00			1 laporan	5.122.422.690,00	
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	8.314.898.475,00			100%	9.146.388.322,50	Bag. Umum
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai, perangko dan benda pos lainnya	Tobelo	12 bln	63.000.000,00			12 bln	69.300.000,00	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, air, listrik, surat kabar/ majalah dan jasa transaksi keuangan	Tobelo	12 bln	1.766.612.175,00			12 bln	1.943.273.392,50	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa ruang rapat, meja kursi, tenda dan sound system	Tobelo	12 bln	360.000.000,00			12 bln	396.000.000,00	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor untuk PTT dan peralatan kebersihan kantor, Tersedianya jasa service dan perbaikan komputer, printer, sound system, telpon pabx, AC, Meubiler, CCTV Kantor dan Pemeliharaan Aplikasi Administrasi Kantor serta sms blast, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya makan minum kesekretariatan (harian, rapat, lapangan)	Tobelo	12 bln	6.125.286.300,00			12 bln	6.737.814.930,00	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		100%	4.987.500.000,00			100%	5.486.250.000,00	Bag. Umum
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan	Tobelo	12 bln	200.000.000,00			12 bln	220.000.000,00	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (lost only) dan sewa mobil dinas,	Tobelo	12 bln	2.824.000.000,00			12 bln	3.106.400.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		Penang. jawab Keg
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, bbm/ bahan pelumas, Pajak kendaraan bermotor dan stnk								
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan untuk rumah jabatan dan gedung kantor, Terlaksananya rehab rumah dinas dan gedung kantor, Tersedianya fasilitas sewa rumah/ gedung kantor.	Halut	12 bln	1.963.500.000,00			12 bln	2.159.850.000,00	
	7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Terlaksannya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	3.230.700.000,00			100%	3.553.770.000,00	Bag. Umum
		1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tobelo	12 bln	1.666.550.000,00			12 bln	1.833.205.000,00	
		2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tobelo	12 bln	1.312.850.000,00			12 bln	1.444.135.000,00	
		3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Tobelo	12 bln	251.300.000,00			12 bln	276.430.000,00	
	8	Penataan Organisasi		Terlaksannya Pentaan Organisasi		100%	1.560.801.795,00			100%	1.716.881.974,50	Bag. Organisasi
		1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusnya Dokumen pengelolaan kelembagaan daerah, Jumlah kegiatan inventarisasi data kelembagaan, Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah, Jumlah perangkat daerah yang dimonev	Luar Daerah Antar Provinsi	2 Dokumen	430.615.000,00			2 Dokumen	473.676.500,00	
		2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusnya laporan IKM, Terlaksananya pelayanan publik	Luar Daerah Antar Provinsi	1 Laporan	254.000.000,00			1 Laporan	279.400.000,00	
		3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen road map Reformasi Birokrasi	Halut	2 dokumen	94.951.500,00			2 dokumen	104.446.650,00	
		4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Laporan Jumlah Aparatur yang taat pada aturan ketatalaksanaan, Jumlah kegiatan pelayanan publik perangkat daerah	Halut	1 Dokumen	135.000.000,00			1 Dokumen	148.500.000,00	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusnya laporan koordinasi & dokumen capaian kinerja, Jumlah laporan kinerja, Terlaksananya review terhadap lapaoran E-Sakip, Coching Clinic, SAKIP	Halut	2 Dokumen	646.235.295,00			2 Dokumen	710.858.824,50	
	9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Peningkatan kinerja kegiatan pelaksanaan protocol & Komunikasi Pimpinan	Halut	100%	6.241.918.500,00			100%	6.866.110.350,00	Bag. Umum

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		Penang. jawab Keg
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya peringatan hari ulang tahun kabupaten, dan HUT Korpri	Halut	2 Laporan	1.536.918.500,00			2 Laporan	1.690.610.350,00	
		2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksannya Fasilitasi Komunikasi Forum Komunikasi Pimpinan	Halut	6 Laporan	4.705.000.000,00			6 Laporan	5.175.500.000,00	
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Peningkatan Skor Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Predikat Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)		70,23	5.569.000.550,00			75,84	4.825.315.055,00	
	1	Administrasi Tata Pemerintahan		Tersusunnya Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan		100%	958.165.000,00				1.053.981.500,00	Bag. Tapem
		1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Keelayahan	Halut	1 Dokumen	250.000.000,00			1 Dokumen	275.000.000,00	
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksannya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Halut/ Luar Daerah Antar Provinsi	6 Dokumen	708.165.000,00			6 Dokumen	778.981.500,00	
	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksannya fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Halut	1Dokumen	3.178.485.050			1Dokumen	3.496.333.555,00	Bag. Kesra
		1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Presentase pembinaan ketakwaan	Halut/ Luar Daerah Antar Provinsi	6 dok	3.129.423.800			6 dok	3.442.366.180,00	
		2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tersusunnya dokumen hasil kebijakan, evaluasim dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan social, transmigrasim kesehatanm pemerdayasaan perempuan & perlindungan anak, administrasi kependudukan & pencatatan sipil & pemberdayaan masyarakat	Halut	1 dokumen	49.061.250,00			1 dokumen	53.967.375,00	
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Terlaksannaya fasilitasi Produk Hukum Daerah	Halut/Luar Daerah	1 dokumen	1.182.350.500,00			1 dokumen	1.300.585.550,00	Bag. Hukum
		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya rencana kerja rancangan peraturan, lembaran daerah, berita daerah, dan rancangan peraturan perundang undangan	Halut/ Luar Daerah Antar Provinsi	3 produk	505.989.000,00			3 produk	556.587.900,00	
		2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum, dan terlaksananya pelaksanaan hak asasi manusia.	Halut/ Luar Daerah	10 kasus	141.596.500,00			10 kasus	155.756.150,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		Penang. jawab Keg
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Antar Provinsi							
		3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Halut/ Luar Daerah Antar Provinsi	450 Produk	534.765.000,00			450 Produk	588.241.500,00	
	4	Fasilitasi Kerjasama Daerah				95%	250.000.000,00			95%	275.000.000,00	Bag. Umum
		1	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Tercapainya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Negara Lain	Luar Negeri	1 keg	250.000.000,00			1 keg	275.000.000,00	
III	Program Perekonomian dan Pembangunan						1.287.500.000,00				1.416.250.000,00	
	1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					262.500.000,00				288.750.000,00	Bag. Administrasi
		1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data/ informasi, Jumlah dokumen RKT Sekretariat Daerah	Tobelo	dokumen	262.500.000,00			dokumen	288.750.000,00	
	2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.025.000.000,00				1.127.500.000,00	Bag. ULP
		1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	Halut	80 Dokumen	721.150.000,00			80 Dokumen	793.265.000,00	
		2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Halut	2 Dokumen	268.850.000,00			2 Dokumen	295.735.000,00	
		3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang & Jasa	Halut	30 Orang	35.000.000,00			30 Orang	38.500.000,00	
TOTAL KESELURUHAN							40.908.866.470,00				44.999.753.117,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

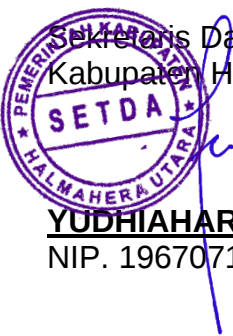
Rencana Kerja (Renja) memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh bagian-bagian dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Tobelo, 21 Juli 2021

Sekretaris Daerah
Kabupaten Halmahera Utara,



YUDHIAHART NOYA, S.si, MH
NIP. 196707101991031017